

**PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK BERDASARKAN SURAT TEGURAN
DAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SINGARAJA**

Oleh

Gusti Ayu Putu Putrika Yanti NIM 1807021022

Jurusian Ekonomi dan Akuntansi

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penerbitan surat teguran dan surat paksa di kantor pelayanan pajak pratama singaraja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Jurusita beserta dan pihak-pihak yang terkait dengan seksi penagihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data adalah teknik deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Singaraja menggunakan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai acuan pelaksanaan surat teguran dan surat paksa sebagai tindakan penagihan pajak. Dalam pelaksanaannya KPP Pratama Singaraja telah menjalankan SOP dengan baik dan juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Namun dalam hal penyampaian surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak Jurusita kerap kali menemui hambatan, diantaranya wajib pajak yang kurang paham akan perpajakan dan alamat wajib pajak yang tidak valid.

Kata-kata Kunci: Prosedur, Surat Teguran, Surat Paksa, Hambatan, Jurusita

BILLING PROCEDURES BASED ON WARNING LETTERS AND FORCED LETTERS AT THE SINGARAJA PRATAMA TAX OFFICE

by

Gusti Ayu Putu Putrika Yanti NIM 1807021022

Department of Economic and Akuntansi

D3 Akuntansi

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the procedures for issuing tegutan and forced letters are at the Singaraja Pratama Tax Office. This research is a qualitative descriptive study. The data used are primary and secondary data obtained from interviews with the bailiff and related parties with the billing section. The method used in this research is documentation, interviews and literature study. The data analysis technique is a descriptive technique.

The results of this study indicate that the issuance of warning letters and forced letters at KPP Pratama Singaraja uses the Standard Operating Procedure (SOP) that has been set by the Directorate General of Taxes as a reference for the implementation of warning letters and forced letters as tax collection actions. In its implementation, KPP Pratama Singaraja has carried out the SOP properly and is also in accordance with the Law of the Republic of Indonesia No.19 of 2000 concerning Tax Collection by Forced Letters. However, in the case of submitting warning letters and forced letters to the bailiff, they often encounter obstacles, including taxpayers who do not carry out taxes and the address of the taxpayer is not valid.

Keywords: *Procedure, Warrant, Forced Letter, Barriers, Bailiff*